



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 393/HK/KPTS/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 615/HK/KPTS/2016 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021**

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/87/AA.05/2018, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena belum memiliki tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil dengan dilengkapi indikator yang tepat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 615/HK/KPTS/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak Tahun 2016-2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

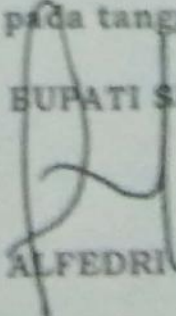
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 615/HK/KPTS/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK TAHUN 2016-2021.**
- KESATU :** Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perubahan pada tujuan dan sasaran strategis.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pengukuran kinerja
 - e. pelaporan kinerja;
 - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 April 2018

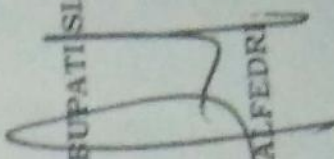
Plt. BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 343 / HK / KPTS / 2018
 Tanggal : 18 April 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK
TAHU 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak	Jumlah Organisasi dibawah naungan KORPRI yang terbentuk	1	-	-	-	-
		Organisasi	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Dewan Pengurus KORPRI kepada Anggota KORPRI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitas Dewan Pengurus KORPRI kepada Anggota KORPRI	Tingkat Kepuasan Dewan Pengurus KORPRI terhadap Pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak (Skala 1-4)	-	3	3	4	4
		Tingkat Kepuasan Anggota KORPRI terhadap Fasilitas Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak (Skala 1-4)	-	3	3	4	4

Pit. BUPATI SIAK

 ALFEDRI